

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II, Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan terjadi pada 17 Agustus 1945, namun perjuangan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dari pihak asing masih terus berlanjut. Pada masa itu Indonesia berada dalam situasi darurat perang dengan segala ketidakstabilannya. Status Indonesia yang masih baru merdeka juga diuji oleh kedatangan kekuatan asing yaitu Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali dengan dibantu Sekutu. Hal ini menyebabkan Indonesia menjalani hiruk pikuk perubahan bentuk pemerintahan. Situasi yang belum stabil secara politik, ekonomi dan sosial pasca-kemerdekaan serta terjadinya polarisasi kekuatan setelah kemenangan sekutu pada Perang Dunia II membuat Indonesia berkembang sebagai negara yang menerapkan berbagai bentuk pemerintahan untuk menunjang kepentingan nasional dan kehidupan bangsa. Perubahan bentuk pemerintahan terjadi secara bertahap untuk beradaptasi dengan ketidakstabilan pada masa pasca-kemerdekaan. Soekarno merupakan seorang tokoh berpengaruh dikarenakan pemikirannya dan merupakan presiden pertama Republik Indonesia.

Pasca-kemerdekaan situasi politik dunia terpecah menjadi dua poros yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Dua negara adidaya yang tampil adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat, kedua negara adidaya itu membentuk poros masing-masing untuk memperebutkan pengaruh. Pertarungan antar ideologi liberalis-kapitalis yang diwakili Amerika Serikat melawan sosialisme komunis Uni Soviet. Masing-masing pihak berusaha melebarkan kekuatannya dengan caranya sendiri. Poros kekuatan dunia terbagi dua dan terbentuklah sekutu aliansi dari masing-masing blok. Blok Barat membentuk NATO pada 4 April 1949, di lain

pihak Blok Timur membentuk Pakta Warsawa pada 14 Mei 1955. Keduanya terus melanjutkan perebutan hegemoni dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia, hingga berakhir pada saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991.

Terjadinya polarisasi politik global berpengaruh terhadap penerapan politik dalam menjalin hubungan dengan negara luar. Oleh sebab itu, dalam Perang Dingin Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak politik kedua blok tersebut. Unsur geopolitik merupakan unsur sentral yang memiliki peran utama dalam memberikan gambaran perpolitikan dunia, pembagian negara serta blok, dan hierarki negara adikuasa terhadap negara yang lebih kecil. Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang baru merdeka menjadi sasaran negara adidaya untuk diajak bergabung ke dalam blok-blok tersebut.

Belanda yang menginginkan Indonesia kembali sebagai negara jajahannya mencoba melakukan konfrontasi baik melalui politik dan militer. Pada bidang politik, Belanda menghendaki adanya sistem pemerintahan parlemen di mana Indonesia menjalankan perpolitikan di bawah pimpinan Ratu Belanda. Secara militer, Belanda melakukan Agresi Militer pertama dan kedua untuk mengukuhkan kekuasaannya agar Indonesia kembali berada pada kekuasaannya. Diterapkanlah sistem Demokrasi Liberal dengan menjadikan bentuk negara sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (UUD RIS).

Penerapan sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959 menuai kegagalan akibat tidak stabilnya politik yang menyebabkan pergantian kabinet secara terus menerus dalam tempo waktu yang singkat. Selama kurun waktu 14 tahun (1945-1959) telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Ini artinya rata-rata kabinet hanya berusia kurang lebih 15 bulan saja, akan tetapi ada pula kabinet tertentu yang mampu bertahan lebih dari 2 tahun. Sistem multi partai yang dianut mengakibatkan pertumbuhan partai politik hingga 137 partai. Sistem

demokrasi parlementer memberikan tempat untuk dominasi partai pada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini diperburuk dengan ketidakmampuan anggota konstituante untuk menciptakan konsensus.

Permasalahan demokrasi parlementer membuat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut memberlakukan kembali UUD 1945. Peristiwa ini juga menjadi lahirnya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan wujud tindak lanjut dari Soekarno selaku presiden untuk membenahi pemerintahan saat itu. Secara sederhana, Demokrasi Terpimpin dapat dipahami sebagai sebuah bentuk pemerintahan demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk pemimpin negara. Iskandar Syah (2016) menyatakan bahwa konsep Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno adalah menciptakan stabilitas politik.

Awalnya Indonesia memilih untuk netral dan tidak berkubu baik ke Blok Barat maupun Blok Timur. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, politik luar negeri Soekarno mulai diarahkan ke kiri dan menempatkan posisi Indonesia sebagai negara anti imperialisme dan kolonialisme. Sikap anti-nekolim ini berakar pada Marhaenisme dan Nasakom yang merupakan pandangan hidup Sukarno untuk Indonesia. Terjadi penyimpangan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dengan menjalankan politik konfrontasi terhadap negara-negara Barat pada masa Demokrasi Terpimpin. Contoh politik konfrontasi ini terjadi pada tahun 1961 ketika Inggris mencoba menggabungkan wilayah koloninya menjadi satu dalam Federasi Malaysia. Indonesia kemudian menyatakan penolakan terhadap pendirian Federasi Malaysia. Soekarno berpendapat bahwa Federasi Malaysia merupakan negara bentukan Inggris, dan hal ini memungkinkan Inggris untuk melakukan kontrol atas Asia Tenggara khususnya Indonesia sebagai tetangga terdekat (Notosusanto, 2016).

Politik konfrontasi ini dilandasi oleh pemikiran Soekarno tentang Nefo (*New Emerging Forces*) dan Oldefo (*Old Established Forces*). Nefo adalah kekuatan yang muncul seperti negara-negara

progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Menurut Soekarno, kekuatan Nefo adalah antitesis dari Oldefo. Hal ini membuat ruang gerak diplomasi Indonesia sempit karena membatasi diri dan cenderung kepada negara komunis sehingga tidak lagi mencerminkan politik bebas aktif. Perlu diketahui bahwa maksud dari politik luar negeri bebas aktif untuk memenuhi kepentingan nasional dengan melaksanakan hubungan diplomasi yang aktif namun bebas dari pengaruh politik poros. Namun ketika Soekarno sudah condong kepada politik poros negara-negara komunis maka tidak mencerminkan bebas aktif lagi. Lawan politik Soekarno adalah kekuatan Barat imperialis kolonialis dan dalam pelaksanaan politik luar negerinya cenderung radikal dan konfrontatif.

Perpolitikan dalam negeri semasa kepemimpinan Soekarno beserta dinamikanya dipengaruhi juga oleh Perang Dingin. Partai besar saat kepemimpinan Soekarno adalah PKI, NU, Masyumi dan PNI. Namun Soekarno lebih cenderung berhubungan dekat dengan PKI. Partai Komunis Indonesia di lain pihak menjadikan kedekatan tersebut untuk mendukung segala keputusan Soekarno. Partai Komunis Indonesia memiliki basis massa terbesar dibandingkan partai lainnya, oleh sebab itu PKI dapat mengindoktrinasi pandangan idealis terhadap Soekarno untuk menggerakkan rakyat.

Sebelum Indonesia merdeka telah terjalin hubungan dengan Uni Soviet. Hubungan tersebut dilakukan oleh PKI dengan Komintern di Moskow. Hubungan Uni Soviet masih terbatas kepada partai komunis lokal (dalam hal ini PKI) dan bukan kepada kepala negara. Pada tahun 1920 pola hubungan luar negeri Komintern untuk Asia didasarkan pada pandangan Lenin bahwa revolusi melawan kapitalisme melibatkan aliansi partai dari negara yang melawan borjuis. Pada kongres tahun 1928, Stalin sebagai ketua Komintern menolak strategi aliansi komunis dengan para pemimpin nasionalis. Pada era Stalin, strategi Komintern

untuk gerakan revolusioner di Asia Tenggara tidak mendapatkan perhatian lebih setelah terjadi rivalitas dengan Tiongkok. Hal ini berpengaruh kepada pola hubungan Uni Soviet di Asia yang mengakibatkan Soviet menjauh dari Asia (N. Wing Mah, 1950).

Pada tahun 1945 hingga 1953 merupakan periode tidak aktif bagi Uni Soviet. Hal itu disebabkan karena lemahnya Uni Soviet setelah Perang Dunia II dan sibuk memperbaiki kondisi dalam negeri yang belum stabil. Walaupun menjadi pemenang, keadaan Uni Soviet setelah Perang Dunia II hancur, rekonstruksi ekonomi dibutuhkan dan sekitar dua puluh juta penduduknya tewas (Menon, 1986). Uni Soviet dengan kondisi lemah belum mampu menyebarkan pengaruhnya pada negara di Dunia Ketiga untuk bersaing dengan kekuatan Blok Barat.

Uni Soviet mulai membantu Indonesia pada 21 Januari 1946. Melalui delegasi Republik Soviet Sosialis Ukraina, mereka mengirimkan berita kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan penyelidikan kepada aksi yang dilakukan tentara Belanda dan Inggris yang menduduki Indonesia. Isi berita tersebut adalah mendesak dewan keamanan PBB untuk segera bertindak karena tentara Belanda dan Inggris melakukan aksi militer kepada penduduk sipil dan mengancam perdamaian di Indonesia. Karena desakan tersebut, Inggris mengubah taktik dan menghentikan dukungan militer langsungnya kepada Belanda. Walaupun sejak Desember 1947 kepada Soeripno, kepala misi diplomatik Indonesia di Cekoslovakia telah diberikan mandat untuk menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya, namun tekanan politik dari pihak Belanda dan Amerika Serikat telah menghambat dijalinnya hubungan antara Indonesia dengan Soviet (Kapitsa & Maletin, 2017)

Tujuan Stalin adalah prioritas Soviet di Eropa dengan harapan melemahkan pasukan musuh-musuhnya yaitu negara anggota NATO. Uni Soviet di bawah Stalin memandang Asia Tenggara sebagai kepentingan sekunder dengan beberapa alasan, yaitu : masuknya campur

tangan Barat dalam kawasan Asia Tenggara, besarnya penempatan militer Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara, serta sulitnya penempatan kekuatan militer apabila konflik bersenjata terjadi. Berdasarkan kesukaran-kesukaran tersebut Uni Soviet menganggap Asia Tenggara hanya sebatas kepentingan sekunder terutama karena Uni Soviet lebih memprioritaskan politik luar negeri Blok Timur Eropa. Sementara itu negara Non-Blok tidak melihat banyak keuntungan jika memihak Moskow dalam persaingan strategisnya dengan Barat karena telah menentukan untuk tidak bergabung dengan blok mana pun karena akan terjadi ketidaknetralan. Stalin sendiri memimpin Uni Soviet hingga akhir hayatnya pada tahun 1953. Stalin menderita stroke yang tidak lama, yang pada akhirnya wafat pada tanggal 5 Maret 1953 (Kenez, 2006).

Uni Soviet kemudian memasuki kepemimpinan Khrushchev. Pada era Khrushchev mulai terjadi hubungan dengan negara Dunia Ketiga. Sigit Aris Prasetyo (2021) menyatakan bahwa bagi Khrushchev, negara di Asia dan Afrika (Indonesia, Tiongkok, dan beberapa negara Amerika Latin) dapat dirangkul serta bahkan dipengaruhi untuk bergabung dengan Blok Timur. Kebijakan era Khrushchev memberikan perubahan progresif sehingga pada akhir kepemimpinannya Khrushchev dituduh lawan politiknya melakukan 'destalinisasi'. Khrushchev beralasan bahwa negara-negara Non-Blok sebagai zona damai sedangkan Stalin tidak mempercayai negara Non-Blok karena dianggap sebagai negara yang akan membutuhkan kekuatan Barat. Pandangan Stalin terhadap perpolitikan dunia cenderung kaku dengan unsur bipolar antara komunisme melawan kapitalisme (Menon, 1986). Sikap Khrushchev yang membuka hubungan dengan Negara Dunia Ketiga bertolak belakang dengan pandangan Stalin.

Indonesia dan Uni Soviet saling membuka kedutaan besar pada tahun 1954. Pembicaraan serius mengenai Indonesia baru muncul pada tahun 1955 saat penandatanganan Deklarasi Bandung. Ketika itu

Indonesia dibicarakan pada tingkat Presidium Komite Sentral sebab nama Indonesia menarik perhatian dunia. Tidak luput pula nama Soekarno juga muncul dalam surat kabar Uni Soviet.

Indonesia memilih untuk menerapkan prinsip politik Luar Negeri Bebas Aktif yang pertama kali diutarakan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yaitu “Mendayung di antara Dua Karang”. Pidato tersebut merupakan reaksi Indonesia di tengah pertarungan dari kedua blok besar. Maksud dari bebas adalah Indonesia tidak memihak terhadap kekuatan-kekuatan mana pun, sesuai dengan kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin di dalam Pancasila. Sedangkan aktif artinya menjalankan kebijaksanaan luar negeri dan Indonesia juga tidak bersifat pasif melainkan aktif terhadap kejadian internasional dan ikut mendorong terciptanya perdamaian dunia (Kusumaatmadja, 1983). Namun sikap netral Indonesia yang awalnya diterapkan dalam politik bebas-aktif berangsur-angsur berubah. Soekarno dengan pemikirannya menerapkan politik luar negeri yang sangat berbeda dan cenderung mulai condong kepada Blok Timur. Terutama saat menyikapi isu Irian Barat, Indonesia mendapat bantuan militer langsung dari Uni Soviet dan terjadi kontak bersenjata dengan Belanda yang disponsori oleh Blok Barat. Isu Irian Barat secara geopolitik makin mendekatkan hubungan bilateral Indonesia dan Uni Soviet pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an terutama di bidang diplomasi, ekonomi, dan militer (Prasetyo, 2021).

Sepanjang tahun 1960-1962 yaitu ketika konflik perebutan Irian Barat sedang di puncaknya, Indonesia membeli sebagian besar perlengkapan perangnya dari Uni Soviet dan beberapa negara Blok Timur. Ribuan personel militer dari tiga matra udara, darat dan laut-juga dilatih di berbagai pangkalan militer Uni Soviet. Menjelang 1965 Soekarno membentuk poros Jakarta-Peking yang menghubungkan Jakarta, Phnompenh, Peking, Pyongyang (Legge, 1985).

Dilatarbelakangi oleh Perang Dingin, situasi politik Indonesia yang belum stabil, serta kecenderungan Soekarno kepada kekuatan Blok Timur menjadikan hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet menarik untuk diteliti terutama pada periode kepemimpinan Soekarno. Penelitian yang membahas tema-tema hubungan Indonesia dengan negara Blok Timur juga belum banyak diteliti sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih kepada tema tersebut.

Beberapa penelitian relevan seperti artikel dari Jurnal Masyarakat & Budaya oleh Wahyudi Akmaliah yang berjudul “Indonesia Yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 Dan Kemunculan Eksil Indonesia” membahas tentang hubungan luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno dan pengaruhnya dengan menyekolahkan pelajar Indonesia ke luar negeri. Disebutkan bahwa Indonesia telah mengirim pelajar ke Amerika Serikat, Uni Soviet hingga Cina. Namun tulisan ini hanya berfokus kepada pra dan pasca Peristiwa 1965-1966 sehingga pembahasan mengenai Uni Soviet masa Soekarno belum terlalu dijelaskan secara komprehensif. Selain itu fokus penelitian ini bukanlah hubungan Indonesia dan Uni Soviet di berbagai bidang melainkan memaparkan tentang nasib pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri dalam tempo waktu tersebut.

Adapun tulisan berjudul “Antara Indonesia dan Rusia, Sebuah Tinjauan Sejarah” oleh Aelina Surya yang diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran. Pada tulisan tersebut dibahas hubungan Indonesia dan Rusia yang dahulu adalah Uni Soviet namun pembahasan hubungan Uni Soviet dengan Indonesia pada zaman Orde Lama dibahas singkat. Pada tulisan tersebut membahas dibahas sektor seperti militer, ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya. Tetapi isinya membahas secara singkat dan menyeluruh dan bukan menggunakan batasan temporal kepada presiden yang sedang memimpin Indonesia. Selain itu tulisan ini lebih memfokuskan kepada periode hubungan Uni Soviet setelah menjadi negara Rusia dalam periode kontemporer.

Menurut Bantarto Bandoro dalam artikel ilmiahnya yang diterbitkan CSIS pada tahun 1984 yang berjudul “Pasang-Surut Hubungan Indonesia-Soviet” memaparkan bahwa hubungan resmi Indonesia-Soviet setelah 1954 tidak berlangsung begitu baik. Hal itu dalam arti bahwa masa-masa pahit banyak mewarnai hubungan Indonesia dan Uni Soviet walaupun Soviet mendukung Indonesia dalam masalah Irian Barat. Bantarto menyatakan dalam penelitiannya bahwa walaupun Indonesia tetap menjalin hubungan secara formal dengan Uni Soviet, Indonesia pada saat di mana Uni Soviet sedang menghadapi konflik dengan Cina, mengambil suatu kebijakan bersahabat dengan RRC yang pada waktu itu memang menaruh perhatian besar pada usaha mencari sekutu-sekutu revolusioner. Sebagai akibatnya hubungan Indonesia dan Soviet renggang dan mengalami titik balik. Hubungan bersahabat Indonesia dan RRC itu kemudian melahirkan poros Jakarta-Peking pada tahun 1965. Hal itu kemudian disalahgunakan oleh RRC untuk mendukung kegiatan Partai Komunis Indonesia. Dukungan itu mencapai puncaknya dengan terjadinya percobaan kudeta akhir 1965 dan sejak itu pula Indonesia memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatiknya dengan RRC.

Berdasarkan penelitian-penelitian relevan tersebut belum muncul penelitian yang membahas hubungan Indonesia dengan Uni Soviet secara komprehensif yang meliputi berbagai bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif hubungan luar negeri antara Indonesia dan Uni Soviet pada tahun 1954-1967.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet pada tahun 1954-1967. Batasan temporal penelitian ini mengacu kepada Indonesia yang mulai saling membuka kedutaan besar luar negeri untuk Uni Soviet pada tahun 1954. Selain itu masa kepemimpinan Soekarno khususnya pada masa

Demokrasi Terpimpin terlihat jelas memiliki hubungan dengan negara berhaluan kiri. Periode penelitian diakhiri ketika masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan digantikan dengan dilantiknya Presiden Soeharto. Batasan spasial merupakan batasan ruang tempat peristiwa sejarah terjadi. Batasan spasial penelitian ini adalah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana posisi Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan Uni Soviet pada tahun 1954-1967?
2. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pada masa kepemimpinan Nikita Khrushchev?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui posisi Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan Uni Soviet pada tahun 1954-1967
2. Menjelaskan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pada masa kepemimpinan Nikita Khrushchev

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan tentang sejarah Indonesia maupun sebagai bentuk penulisan sejarah kontemporer yang berkaitan dengan Perang Dingin dan Blok Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antara kedua negara yaitu Indonesia dan Uni Soviet pada tahun 1954-1967 sebagai penambah sejarah bangsa dan hubungannya dengan Blok Timur.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi sejarah bagi civitas academia dari segala tingkatan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi pembahasan sejarah Indonesia dalam bidang hubungan luar negeri.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Penelitian historis memiliki tujuan merekonstruksi masa lalu dengan sistematis dan objektif melalui mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menghubungkan bukti-bukti sejarah yang kemudian digunakan untuk mendapatkan fakta serta memperoleh suatu kesimpulan. Menurut Kuntowijoyo (2005) penelitian historis memiliki beberapa langkah-langkah yaitu pemilihan topik, dilanjutkan dengan heuristik yaitu pengumpulan sumber, kemudian verifikasi atau disebut dengan kritik sejarah, interpretasi, dan historiografi yaitu penulisan sejarah.

Langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan topik. Ketika melakukan pemilihan topik, penulis memiliki ketertarikan terhadap sejarah Uni Soviet pada tahun 1954-1967. Pada tahap kedua yaitu heuristik. Pada tahap ini sumber-sumber yang dibutuhkan akan dicari. Sumber-sumber yang akan digunakan diantaranya berupa dokumen sezaman, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, surat kabar sezaman dan untuk sumber sekunder adalah buku dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi sumber atau kritik sejarah. Sumber-sumber yang telah diperoleh akan diidentifikasi. Bagi sumber primer maka akan dicek keasliannya,

apakah dokumen sezaman tersebut benar-benar asli, singkatnya dengan memverifikasi isi, bentuk tulisan, kertas, institusi yang mengeluarkan. Sedangkan untuk sumber sekunder diidentifikasi tingkat relevansinya berdasarkan topik yang diteliti.

Keempat adalah tahap penafsiran. Sumber-sumber yang telah diperoleh dan telah lolos tahap verifikasi akan ditafsirkan dengan menghubungkan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Pada tahap ini penulis akan memberikan penafsiran objektif terhadap topik penelitian.

Terakhir adalah historiografi. Ketika melakukan historiografi, peneliti akan melakukan penulisan sejarah. Penulisan sejarah dilakukan dengan sistematis, objektif dan terstruktur. Fakta yang diperoleh dari sumber-sumber akan dituangkan dalam penulisan sejarah sesuai topik yang diteliti.

2. Bahan Sumber

Sumber penelitian ini adalah buku-buku yang relevan serta sumber-sumber lainnya seperti dokumen sezaman. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Buku yang digunakan salah satunya adalah buku yang ditulis oleh M.S Kapitsa dan N. P Maletin berjudul Soekarno : Biografi Politik. Buku ini merupakan literatur Uni Soviet dan merupakan salah satu sumber yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya ada buku yang ditulis Sigit Aris Prasetyo berjudul Soekarno dan Khrushchev : Beda Ideologi, Satu Hati. Buku ini berisi tentang persahabatan Soekarno dan Khrushchev. Walaupun dekat, Soekarno tetap mempertahankan pemikirannya sendiri dan tidak pernah menyatakan bahwa Soekarno adalah seorang komunis yang tunduk kepada Moskow. Selanjutnya ada buku yang berjudul Memoar Nikita Khrushchev Jilid 3 : Negarawan 1953-1964 yang ditulis oleh Khrushchev sendiri. Buku ini merupakan sumber penting sebab memuat informasi mengenai

hubungan politik luar negeri Uni Soviet selama masa kepemimpinan Khrushchev. Buku ini juga termasuk dalam seri memoar Khrushchev yang terdiri atas 3 jilid. Selanjutnya ada buku yang berjudul *The Soviet Union in Southeast Asia* yang ditulis oleh Mediansky. Buku ini menggambarkan garis besar kehadiran Uni Soviet di wilayah Asia Tenggara. Artikel jurnal yang digunakan adalah artikel karya Arifin Suryo Nugroho berjudul *Soekarno dan Diplomasi Indonesia*. Artikel tersebut berisi tentang diplomasi Indonesia oleh Soekarno dan politik luar negeri.

Sumber primer yang digunakan adalah dokumen sezaman. Dokumen sezaman yang akan digunakan dapat berupa surat kabar, bukti dokumentasi seperti foto, serta arsip. Dokumen sezaman ini bisa didapatkan dari Perpustakaan Nasional Indonesia, Arsip Nasional, arsip museum ataupun dari lembaga-lembaga yang menyimpan sumber sejarah yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Salah satu arsip yang sudah diperoleh adalah *Guide Arsip Diplomasi Indonesia tahun 1945-2009*. Informasi arsip yang dimuat dalam guide arsip ini adalah peristiwa besar dalam sejarah diplomasi Indonesia. Sebagai contoh yaitu usaha mempertahankan kemerdekaan, perebutan Irian Barat, penyelenggaraan KAA, GNB, ASEAN dan lain sebagainya. Sumber ini digunakan sebab masih berkaitan dengan proses diplomasi Indonesia pada masa Soekarno.